

**STRATEGI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG
DALAM PENATAAN PKL DI KAWASAN PANTAI MUARO LASAK**

*Diajukan untk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana
Administrasi Public pada Jurusan Administrasi Publik Fakutas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang*

SKRIPSI



DEDI HERMANTO

1305950/2013

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2018

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam
Penataan PKL di Kawasan Pantai Muaro Lasak
Nama : Dedi Hermanto
TM/NIM : 2013/1305950
Program Studi : Administrasi Publik
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

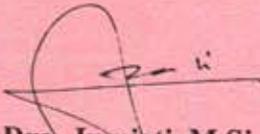
Padang, 17 Juli 2018

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si
19621109 198602 2 001


Dra. Jumiati, M.Si
19630617 1989 1 003

PENGESAHAN LULUSAN UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Jurusan
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada Hari Selasa, 17 Juli 2018 pukul 10.30 s/d 12.30 WIB

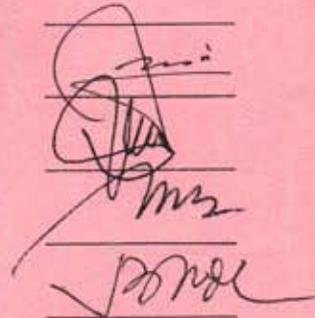
**Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam Penataan
PKL di Kawasan Pantai Muaro Lasak**

Nama : Dedi Hermanto
TM/NIM : 2013/1305950
Program Studi : Administrasi Publik
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 17 Juli 2018

Tim Penguji :

Nama
Ketua : Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si.
Sekretaris : Dra. Jumiati, M.Si
Anggota : Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D
Anggota : Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D
Anggota : Adil Mubarak, S.IP, M.Si.



Mengesahkan :
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafiq Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap
(Al-lam Nasyrāh : 6-8)

Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap
(Qs. Al-Insyirah : 6-8)

Ya Allah ...

Seizinmu ku berhasil melewati satu rintangan untuk sebuah keberhasilan
Namun kutau keberhasilan bukanlah akhir dari perjuanganku
Tapi awal dari sebuah harapan dan cita-cita
Jalan didepanku masih panjang, masih jauh perjalanaku
Untuk menggapai masa depan yang lebih cerah
Tuk bisa membahagiakan orang-orang yang aku cintai

Karya spesial ini kupersembahkan untuk :

Ibu tercinta Ertini

Serta Kakak Aspi Hani, Susilawati, Metra Niko

Aku takkan pernah lupa semua pengorbanan dan jerih payah yang engkau berikan untukku agar dapat menggapai cita-cita dan semangat serta do'a yang kau lantunkan untukku sehingga kudapat meraih gelar sarjana. Kehangatan yang engkau berikan untukku bisa melewati semua tantangan dalam karyaku ini, cerita panjang dalam jalanku ini menjadi kisah yang tak pernah kulupakan

Tak lupa terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Karjuni dan Ibu Jumiati selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam menyusun skripsi ini, dan tidak lupa pula terima kasih untuk dosen penguji Bapak Syarusir, Bapak Afriva Khidir, Bapak Adil

Mubarak, yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini, semoga ilmu yang bapak berikan bermanfaat.

Terima kasih banyak untuk semua dosen di lingkungan jurusan Administrasi Publik yang telah mencurahkan ilmu kepada saya, semoga ilmu tersebut dapat saya gunakan sebaik-baiknya, tak lupa untuk pegawai tata usaha "Kak Puja dan Uni Sil" terimakasih atas bantuan dan informasi yang telah diberikan

Selanjutnya ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Rayita Dwi Anggrayni, S.Tr.Keb, Try Aulia Fadila, S.AP, Nurwahidan Prasetyo, S.AP, Muhammad Zaki, S.AP yang membantu penulisan skripsi ini



Dedi Hermanto, S.AP

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dedi Hermanto
TM/NIM : 2013/1305950
Program Studi : Administrasi Publik
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang dalam Penataan PKL di Kawasan Pantai Muaro Lasak ”** adalah benar hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sesungguhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 4 Agustus 2018
Yang Membuat Pernyataan



Dedi Hermanto
2013/1305950

ABSTRAK

DEDI HERMANTO : TM/NIM 2013/1305950 Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Dalam Penataan PKL di Kawasan Pantai Muaro Lasak

Latar belakang dilakukannya penelitian ini karena masih adanya PKL yang tidak puas dengan strategi penataan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selaku pelaksana tugas untuk menata zona PKL Pantai Muaro Lasak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran strategi penataan PKL di Pantai Muaro Lasak Kota Padang dan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima di Pantai Muaro Lasak Kota Padang .

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Informan penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki informasi lengkap sesuai kebutuhan peneliti, yaitu Kasi Usahan dan Industri, Kasi Pendataan dan Perencanaan, 15 PKL, pemuda dan tukang parkir Pantai Muaro Lasak yang akan ditata. Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Dalam pengumpulan data digunakan pedoman wawancara, format observasi dan format studi dokumentasi. Dalam penelitian ini data dianalisis dan diinterpretasikan secara kualitatif dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk melaksanakan strategi penataan PKL sesuai zona pantai di Kota Padang terlihat lebih rapi serta juga bertujuan untuk pengembangan objek pariwisata, agar pemandangan pantai terlihat bersih, indah dan berdaya saing. Strategi penataan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan karena ada sejumlah PKL yang tidak paham dengan sebuah aturan saat penataan akan dilakukan karena mereka merasakan adanya penurunan pendapatan dan merasakan kehilangan pelanggan. Dari permasalahan yang ditemui, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang membuat keputusan untuk melaksanakan strategi penataan terhadap PKL yang tidak paham dan tidak patuh pada sebuah aturan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Strategi, Penataan, PKL

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT Rabb semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang Dalam Penataan PKL di Kawasan Pantai Muaro Lasak”** Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Administrasi Publik Jurusan Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ibunda Ertini, Kakak tersayang Susilawati terima kasih yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya yang telah menjadi motivator utama mendampingi penulis hingga penyelesaian skripsi ini. Kemudian kepada rekan-rekan Administrasi Publik UNP angkatan 2013, para senior dan junior juga tentunya yang telah membantu baik fisik maupun mental yang sudah banyak berjasa bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada mereka. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Drs. Karjuni DT. Maani, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dra.

Jumiati, M.Si. selaku pembimbing II sekaligus sebagai penasehat akademik Bapak Adil Mubarak, S.IP yang telah memberikan inspirasi dalam pembuatan karya ilmiah skripsi ini. Terimakasih juga untuk para dosen penguji yakni Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D, Bapak Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D, dan Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si dan yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Ibuk Dra. Jumiati, M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibuk Dosen staf pengajar Jurusan Administrasi Publik Universitas Negeri Padang.
4. Staf karyawan dan karyawanati keputakaan dan staf administrasi Jurusan Admnistrasi Publik dan staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Bapak H. Medi Iswandi, ST, MM selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, Edral Pratama, ST Kasi Usaha dan Industri Dinas Pariwisata, Bapak Jet Peri, S,sos., MM. Kasi Pendataan dan Perencanaan Pariwisata, Staff Pariwisata, yang telah membantu memberikan data dalam

penulisan skripsi ini

6. Sahabat-sahabat penulis Blank SQD, Rayita Dwi Anggrayni S.Tr.Keb, Try aulia Fadila, S.AP, Nurwahidan Prasetyo S.AP, Muhammad Zaky S.AP.
7. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terima kasih untuk ide-ide dan semangatnya.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi ini bisa menjadi layak. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk para pembaca. Amin ya rabbal allamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padang, 24 Juli 2018
Penulis

Dedi Hermanto
1305905

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori	11
1. Konsep Strategi	11
2. Konsep Penataan PKL	14
3. Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang	18
4. Pedagang Kaki Lima	19
5. Ciri-Ciri Pedagang Kaki Lima.	26
6. Penelitian Yang Relevan.	27
7. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Strategi Dinas Pariwisata.....	29
8. Upaya Pemerintah dalam mMelaksanakan Strategi.....	32
B. Kerangka Konseptual	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Informan Penelitian	34
D. Jenis, Sumber, Teknik, dan Alat Pengumpulan Data	36
1. Jenis dan Sumber Data.	36
2. Teknik Pengumpulan Data.	37
E. Alat Pengumpulan Data.	39
F. Uji Keabsahan Data	39

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.	43
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.	43
2. Keadaan Geografis Kota Padang.....	45

3. Visi Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.....	47
4. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata.	47
5. Gambaran umum Penataan Pantai Muaro Lasak.	50
B. Temuan Khusus.	56
1. Pelaksanaan Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Dalam Penataan PKL di Kawasan Pantai Muaro Lasak	56
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang dalam Penataan PKL di Kawasan Pantai Muaro Lasak.....	68
3. Upaya Pemerintah Dalam Melaksanakan Strategi Pemerintah Kota Padang Dalam Penataan PKL di Kawasan Pantai Muaro Lasak Pantai Padang.....	74
C. Pembahasan.....	74
1. Pelaksanaan Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Dalam Penataan PKL di Kawasan Pantai Muaro Lasak	75
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang dalam Penataan PKL di Kawasan Pantai Muaro Lasak.....	81
3. Upaya Pemerintah Dalam Melaksanakan Strategi Pemerintah Kota Padang Dalam Penataan PKL di Kawasan Pantai Muaro Lasak Pantai Padang.....	84

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.	85
B. Saran.	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	49
Gambar 4.2 Konsep Penempatan Fasilitas Parkir.....	51
Gambar 4.3 Konsep Penempatan Fasilitas Tempat Duduk Pengunjung.....	52
Gambar 4.4 Konsep Penempatan Kios Makanan	53
Gambar 4.5 konsep Penempatan Fasilitas Area Bermain Anak-Anak	54
Gambar 4.6 Konsep Penempatan Fasilitas Plaza	55
Gambar 4.7 Tempat Penempatan Pedestrian Way.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	35
------------------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Adapun upaya-upaya yang ditempuh guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat berupa peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat negara dibagi atas provinsi dan provinsi dibagi dalam kabupaten/kota. Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya agar harapan dan tuntutan masyarakat tentang keadilan dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, penegakan hukum, dan penghargaan atas hak asasi manusia tidak bisa ditawar-tawar. Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, maka otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis yang memerlukan pemikiran yang matang, mendasar, berdimensi jauh ke depan. Pemikiran itu kemudian dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan dilandasi prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan, dan keadilan disertai oleh kesadaran akan keanekaragaman/kemajemukan, H. A. W Widjaja(2005: 99).

Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan menanggulangi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahannya tersebut berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki, Sehingga dengan munculnya fenomena PKL dan yang dihadapi oleh pemerintah kota. Hal ini disebabkan karena keberadaan pedagang kaki lima tersebut semakin tumbuh subur di perkotaan, sementara pemerintah kota tidak dapat menerima keberadaan mereka di tengah-tengah kota. Hal ini disebabkan karena pedagang kaki lima pada umumnya dinilai oleh pemerintah melanggar perundang-undangan dan peraturan daerah yang telah diberlakukan. Pelanggaran tersebut seperti menggunakan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) yang tidak diperuntukan bagi pedagang kaki lima, hal tersebut menyebabkan terjadinya kemacetan membuat kota menjadi tidak indah dan bersih serta telah menciptakan kesemrawutan di tengah-tengah kota. Begitu juga dengan permasalahan yang ada di Kota Padang, pedagang kaki lima merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum dapat dituntaskan dan dicarikan solusinya.

Kota Padang merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat dengan roda ekonomi dan kehidupan yang bergerak cepat serta berkembang semakin maju, sehingga dibutuhkan pengelolaan pemerintahan yang tepat agar perkembangan tersebut dapat terkontrol dengan baik dan mampu menjadikan Kota Padang lebih sejahtera dan lebih maju. Kota yang sejahtera dan maju tentunya membutuhkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, hal ini menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Kota Padang sebagai pemegang otoritas

Pemerintahan Daerah. Oleh sebab itu memberikan landasan hukum dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima diperlukan peraturan daerah yang didalamnya mengatur mengenai berbagai hal yang merupakan pilihan kebijakan publik dalam rangka menata dan memberdayakan pedagang kaki lima tersebut. Melalui pengaturan tersebut diharapkan dapat terciptanya suasana tempat usaha pedagang kaki lima yang tertib, bersih, indah, nyaman, dan aman. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas perdagangan sektor informal masyarakat mewujudkan keterpaduan penataan pedagang kaki lima pasar secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang secara berkelanjutan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.

Oleh karena itu dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan tertib ditengah-tengah masyarakat, maka Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan produk hukum daerah sebagai dasar atau pegangan dalam menata kehidupan yang harmonis. Selain itu juga sebagai pegangan dalam mengatasi sekaligus memberi sanksi atas pelanggaran yang secara langsung atau tidak yang mengganggu ketertiban umum. Peraturan daerah Kota Padang No 03 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan bentuk perundangan yang terdapat di Kota Padang. Bab VIII Pasal 31 dalam Peraturan Daerah tersebut menyebutkan bahwa:

(1) Pedagang kaki lima dilarang:

- a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum atau fasilitas umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi Pedagang kaki lima;

- b. Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan dan atau ditentukan walikota;
 - c. Menempati lahan atau lokasi usaha pedagang kaki lima untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. Berpindah tempat atau lokasi dan atau memindahtangankan TDU tanpa sepengetahuan dan izin Walikota;
 - e. Menelantarkan dan atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
 - f. Mengganti bidang usaha dan atau memperdagangkan barang illegal;
 - g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan atau bangunan disekitarnya;
 - h. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi pedagang kaki lima terjadwal dan terkendali;
 - i. Pedagang kaki lima yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
 - j. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha pedagang lainnya.
- (2) Fasilitas umum dilarang untuk tempat usaha pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan tanda larangan untuk tempat atau lokasi pedagang kaki lima.

Saat ini Kota Padang merupakan kota yang mulai berbenah diri dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata. pembenahan Pantai Padang dapat menciptakan momentum untuk kebangkitan Pariwisata, Pantai Padang sepanjang 4 km sudah seharusnya menjadi daya tarik utama yang terletak di tengah kota, akses transportasi yang sangat mudah serta pemandangannya yang sangat luar biasa. Meski beberapa tahun kebelakang pantai padang cenderung menjadi titik lemah karena ratusan bangunan liar yang menutup pantai.

Dengan banyaknya dokumen perencanaan dalam penataan kawasan pantai padang saat ini, hampir semua perencanaan tersebut belum dapat

diaplikasikan. Permasalahan utamanya ialah pembongkaran bangunan liar dan relokasi PKL tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan kesediaan tempat yang belum jelas. Untuk memudahkan perencanaan dan penataan kawasan Pantai Padang sepanjang 4 km dari arah selatan ke utara, akhirnya dibagi dalam 6 sektor, diantaranya:

1. Sektor 1 Pantai muara (mulai dari muara batang arau sampai ke simpang nipah)
2. Sektor 2 Pantai jalan samudara, (mulai dari simpang nipah sampai ke simpang jalan hang tuah)
3. Sektor 3 Pantai Olo (mulai dari simpang hang tuah sampai simpang olo ladang)
4. Sektor 4 Pantai Purus (mulai simpang dif olo ladang sampai ke tugu IORA.
5. Sektor 5 yaitu, Pantai Cimpago (mulai dari tugu IORA sampai Jembatan Purus)
6. Sektor 6; Pantai Muara Lasak/Tugu Perdamaian (mulai dari jembatan purus sampai jalan layang/fly over di belakang hotel pangeran)

Tahap awal yang mesti dilakukan adalah mendata secara detail PKL yang berada dikawasan Pantai Muaro Lasak. Menciptakan suasana komunikasi dengan menerapkan kebijakan yang konsisten dan tidak membeda-bedakan PKL terus dilakukan. Dinas Pariwisata ditempatkan menjadi 'front office' untuk berkomunikasi dan menerima semua keluhan PKL. Permasalahan serta unjuk rasa dari ratusan PKL dapat diformulasikan untuk dicarikan solusinya, yakni melalui berbagai kegiatan yang ada di OPD terkait. Sedangkan penertiban nan ber-etika dilaksanakan Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, unsur Kecamatan nan bersinergi dengan OPD terkait yang didukung Polri dan TNI.

Disamping penataan fisik, pembinaan non fisik juga dilakukan. Pemuda usia kerja direkrut untuk menjadi tenaga kebersihan, relawan Padang by watch serta petugas parkir. Sehingga menjadikan masyarakat sekitar kawasan wisata merasa nyaman dan mampu membawa manfaat bagi peningkatan ekonomi. Dinas Pariwisata difungsikan sebagai “project manager” untuk memetakan permasalahan, menerima dan menghimpun berbagai keluhan, baik wisatawan maupun masyarakat sekitar. Bersama pihak kecamatan terus bersinergi lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Menyusun perencanaan melalui Bappeda mendistribusikan tugas-tugas tersebut untuk dapat menjadi kegiatan prioritas pada OPD terkait. (sumbar today, 15 september 2017).

Dalam pelaksanaan penataan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang diatur dalam Perwako Padang No 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus mampu mengemban dan melaksanakan tugas yang diberikan, sedangkan Pantai Muaro Lasak saat ini menjadi tempat favorit yang diminati pengunjung karena berbagai makanan khas yang disediakan, diantaranya: langkitang, pensi dan kerupuk kuah, ditambah lagi dengan adanya Tugu Perdamaian. Sehingga pantai Muaro Lasak semakin diminati pengunjung, akan tetapi keramaian tersebut membuat pantai menjadi kotor, terhalangnya pemandangan pantai, dan membuat jalur transportasi macet dikarenakan minimnya area parkir yang disediakan pemerintah.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mendalami seperti apa pelaksanaan penataan yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, berdasarkan observasi

yang telah penulis lakukan pada tanggal 12 Agustus 2017, terlihat penataan di Pantai Muara Lasak Kota Padang belum maksimal terbukti PKL belum tertata dengan baik, terlalu padatnya PKL berjualan disekitaran pantai sehingga pemandangan pantai tertutup, dan minimnya ruang parkir menyebabkan kemacetan, serta kebersihan pantai yang tidak terjaga. Ini terlihat dari hasil wawancara awal yang penulis lakukan kepada PKL diantaranya yaitu Ibuk Ica yang mengatakan:

“pemerintah akan melakukan penataan, sedangkan masyarakat yang tinggal disekitaran pantai umumnya hanya bermata pencaharian berdagang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan. Tetapi penataan kawasan pantai muara lasak ini akan memakan waktu yang cukup lama dikarenakan belum adanya kepastian tempat pengalokasian untuk berjualanya dan ganti rugi tempat tinggalnya”.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan pada Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Padang pada kasi usaha dan industri pariwisata yang bernama EDRAL PRATAMA, ST beliau menyampaikan:

“Pengembangan destinasi wisata pantai Kota Padang baru sedikit yang terlaksana dan masih banyak PKL yang melanggar aturan, terutama pada PKL muara lasak yang masih banyak memakai trotoar jalan untuk parkir pengunjung bahkan sampai pada ruas jalan yang membuat kemacetan, dan masih banyak PKL yang kurang peduli akan kebersihan sehingga mengganggu keindahan pantai. Sementara Pemerintah sedang menyusun bagaimana strategi penataan yang akan dilakukan dalam penataan Pantai Muara lasak tersebut”.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Strategi Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Padang Dalam Penataan PKL di Kawasan Pantai Muara Lasak”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi beberapa masalah :

1. PKL Pantai Muaro Lasak belum tertata dengan baik.
2. PKL Pantai Muaro Lasak terlalu padat berjualan sehingga kurangnya keindahan pantai.
3. Ruang parkir Pantai Muaro Lasak tidak tersedia sehingga menyebabkan kemacetan.
4. Kebersihan Pantai Muaro Lasak yang tidak terjaga.

C. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis dan untuk mempertajam pembahasan masalah maka perlu dilakukan pembatasan masalah yaitu penelitian ini membahas Strategi Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Padang dalam Penataan PKL di Kawasan Pantai Muaro Lasak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Strategi Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Padang dalam Penataan PKL di Kawasan Pantai Muaro Lasak?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam Penataan PKL di Kawasan Pantai Muaro Lasak?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan strategi yang diambil Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Padang dalam Penataan PKL di Kawasan Pantai Muaro Lasak.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Padang dalam Penataan PKL di Kawasan Pantai Muaro Lasak.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan Administrasi Publik khususnya di bidang Kebijakan Publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna :

a. Bagi Pemerintah

Dapat memberi masukan atau saran bagi Pemerintah Kota mengenai Strategi Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Padang Dalam Penataan PKL di Pantai Muaro Lasak.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pelaksanaan Strategi Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Padang Dalam Penataan PKL di Kawasan Pantai Muaro Lasak.